

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARKIR DI TERMINAL PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

Oleh

IYAN APRIYANTO

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya petugas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, petugas Parkir belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kepada petugas pemungut retribusi bak yang bersifat langsung dilapangan maupun tidak langsung melalui laporan pelaksanaan tugas dilapangan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir sebanyak 1 orang, Petugas lapangan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data diatas digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Terdapat hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia petugas, kurangnya fasilitas pendukung dilapangan dan minimnya anggaran yang dimiliki, belum optimalnya penyampaian informasi, belum optimalnya pemberian penjelasan, kurang adanya kesediaan petugas untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan UPTD Parkir, belum optimalnya dalam melakukan pembinaan bagi para koordinator dan petugas pemungut. Telah dilakukan upaya yaitu penambahan jumlah petugas, mengomunikasikan seluruh arah pekerjaan dengan semua koordinator dan petugas pemungut, melakukan sosialisasi, memperjelas materi tentang retribusi parkir, menyediakan waktu untuk meninjau langsung ke lapangan, memberikan motivasi dan memberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan pendidikannya.

Kata Kunci : Optimalisasi, Retribusi Parkir

PENDAHULUAN

Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah memaksa Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berbagai macam sumberdaya di daerah yang secara makro dapat

dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya sumber daya alam dan sumber daya manusia, diharapkan benar-benar menjadi motor dalam peningkatan kemandirian daerah. Sumberdaya alam sebagai aset tetap daerah mampu menghasilkan pendapatan asli daerah melalui jasa sewa dan dimanfaatkan sebagai biaya tetap menjalankan pemerintahan, dalam hal ini penggajian aparatur, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Sementara sumber daya manusia diharapkan mampu mengelola sumberdaya

daerah secara optimal. Salah satunya adalah retribusi daerah dalam bentuk retribusi parkir.

Retribusi Daerah dalam bentuk retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi jasa, dimana Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi parkir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran selalu berupaya meningkatkan pelaksanaan pengelolaan yang optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi. Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Pangandaran khususnya UPTD Parkir memungut dan mengelola retribusi parkir di terminal dalam upaya meningkatkan pembangunan daerahnya.

Untuk masalah parkir Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis. Hingga akhirnya, Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut memiliki peraturan tersendiri. Pelaksanaan Perda tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir dijelaskan pada Perbup Ciamis Nomor 24 Tahun 2012. Lalu Perda Kabupaten Ciamis Nomor 9 tahun 2008 tentang penyelenggaraan bidang Perhubungan, kemudian Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang layanan retribusi parkir di tepi jalan umum. Dan, Perda Nomor 14 tahun 2011 Tentang retribusi tempat khusus parkir.

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah. Apabila penerimaan pendapatan daerah maka pembangunan tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya retribusi parkir. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah wisata yang mempunyai prospek yang cukup baik dalam mengelola retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di terminal Pangandaran belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi terminal di Kabupaten Pangandaran belum memenuhi target seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel target dan terealisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

TABEL 1
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TERMINAL
PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN
PADA TAHUN 2011-2013

NO	TAHUN	POTENSI	TARGET	REALISASI	SISA TARGET
1	2011	204.500.000	200.000.000	133.020.000	66.930.000
2	2012	206.250.000	200.000.000	156.969.000	43.031.000
3	2013	209.750.000	200.000.000	157.965.000	42.035.000
4	2014	210.500.000	200.000.000	184.750.000	15.250.000

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Pangandaran, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tiap tahun realisasi retribusi terminal di Kabupaten Pangandaran tidak pernah memenuhi target. Padahal potensi retribusi parkir cukup besar, hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin banyaknya titik-titik lokasi parkir seperti pasar, rumah makan dan hotel serta dilakukannya perbaikan sarana dan prasarana tempat parkir walaupun belum optimal. Penerimaan retribusi parkir ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah. Hanya saja pemungutan retribusi parkir seringkali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pemungutan retribusi parkir sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Dengan demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan manajemen Retribusi daerah yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa belum tercapainya target penerimaan retribusi parkir tersebut diduga disebabkan oleh belum optimalnya pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir yang ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum optimalnya petugas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya, masih ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah

2. Petugas Parkir belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Contoh belum optimalnya kemampuan petugas untuk membantu meningkatkan percepatan pelayanan kepada pengguna jasa parkir.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kepada petugas pemungut retribusi bak yang bersifat langsung dilapangan maupun tidak langsung melalui laporan pelaksanaan tugas dilapangan. Contoh pengawasan hanya dilakukan sesekali saja tidak secara rutin dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir sebanyak 1 orang, Petugas lapangan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi Pustaka (*literature study*)
2. Studi Lapangan
 - a. Observasi
 - b. Wawancara (*interview*)

Teknik analisis data digunakan secara Univariat (analisis satu variabel) yang diinterpretasikan secara kualitatif yang bersumber dari data hasil observasi dan

wawancara. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Tentang Optimalisasi

Optimalisasi adalah tindakan untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan keadaan yang diberikan. Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, Poerdwadarminta (1997 :753) dikemukakan bahwa : "Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien".

Berdasarkan uraian di atas bahwa optimalisasi dalam pemungutan retribusi parkir adalah upaya agar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dapat mencapai target yang telah ditentukan secara efektif dan efisien agar optimal.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Adrian (2008 : 74), mengatakan bahwa:

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan

retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Dasar Hukum Pemungutan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia pada daerah pun juga harus berdasarkan hukum. Beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 286 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 287 Ayat 1 dan 2, bahwa :

Pasal 286

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 287

- (1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Asas-asas Pemungutan

Pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedarga (2004 :12) didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

- (1) Mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan.
- (3) Tarif retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang

diharapkan hanya memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat.

- (4) Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah atau setidaknya-tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah.
- (6) Pemungutan retribusi daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga.
- (7) Peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

Retribusi Parkir

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, (1998:3). Parkir adalah "Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara sedang berhenti dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Pasal 1 Ayat 17 bahwa "Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara".

Pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah daerah dan pelaksanaannya sesuai dengan yang di atur dalam peraturan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah. Apabila penerimaan pendapatan daerah maka pembangunan tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya retribusi parkir.

Untuk mengetahui optimalisasi retribusi parkir di terminal dapat dilihat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap permasalahan dalam pengelolaan retribusi parkir melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan dan apabila melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selardengan standar. Pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan retribusi parkir akan dapat optimal.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dituntut untuk memungut dan mengelola retribusi parkir dan berupaya meningkatkan pelaksanaan pengelolaan yang optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi.

Untuk mengetahui optimalisasi retribusi parkir dalam menghantarkan kesuksesan organisasi perlu didukung oleh adanya pengendalian manajemen yang memadai. Salah satu bentuk nyata pengendalian adalah pada pengukuran dan pengawasan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa aktivitas pengendalian menurut Mahmudi (2013 : 59) yaitu :

1. Perencanaan aktivitas yang akan dilakukan organisasi
2. Pengkoordinasian aktivitas berbagai bagian organisasi
3. Pengkomunikasian informasi ke seluruh bagian organisasi
4. Evaluasi terhadap informasi

Untuk lebih memperjelas mengenai indikator-indikator di atas, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut :

TABEL REKAPITULASI HASIL WAWANCARA TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARKIR DI TERMINAL PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

Sub Variabel	Indikator	Tanggapan Informan	
1. Perencanaan aktivitas yang akan dilakukan organisasi	a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir merumuskan program yang akan dilaksanakan dalam	sebanyak 7 orang atau 70% menyatakan sudah melaksanakan perumusan program	sebanyak 3 orang atau 30% menyatakan masih kurang dalam merumuskan program yang akan dilaksanakan

5. Pembuatan keputusan
6. Mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk mengubah perilaku

PEMBAHASAN

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Pemerintah daerah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah memaksa Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya yang antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah retribusi daerah dalam bentuk retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah. Apabila penerimaan pendapatan daerah maka pembangunan tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya retribusi parkir. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah wisata yang mempunyai prospek yang cukup baik dalam mengelola retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

MODERAT

Modern dan Demokratis

		pemungutan retribusi parkir		
	b.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir menetapkan tujuan dilaksanakannya pemungutan retribusi parkir	sebanyak 7 orang atau 70% menyatakan sudah melaksanakan penetapan tujuan	sebanyak 3 orang atau 30% menyatakan masih kurang dalam menetapkan tujuan dilaksanakannya pemungutan retribusi parkir
	c.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir menetapkan arah yang akan ditempuh dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir	sebanyak 7 orang atau 70% menyatakan sudah mampu menetapkan arah yang akan ditempuh	sebanyak 3 orang atau 30% menyatakan masih kurang mampu untuk menetapkan arah yang akan ditempuh
	d.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir menetapkan prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan	sebanyak 6 orang atau 60% menyatakan sudah menetapkan prosedur dan metode	sebanyak 4 orang atau 40% menyatakan masih kurang dalam menetapkan prosedur dan metode
2. Pengkoordinasian aktivitas berbagai bagian organisasi	a.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir membagi tugas dari setiap koordinator wilayah parkir dan petugas pemungut retribusi parkir yang jelas	sebanyak 6 orang atau 60% menyatakan sudah dapat melakukan pembagian tugas	sebanyak 4 orang atau 40% menyatakan masih kurang
	b.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir memberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada koordinator wilayah parkir dan petugas pemungut retribusi parkir	sebanyak 7 orang atau 70% menyatakan sudah dapat memberikan wewenang	sebanyak 3 orang atau 30% menyatakan masih kurang dalam memberikan wewenang
	c.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir menentukan jumlah sumber daya manusia dan materil yang dibutuhkan di setiap wilayah obyek retribusi	sebanyak 3 orang atau 30% menyatakan sudah dapat menentukan jumlah sumber daya manusia	sebanyak 7 orang atau 70% menyatakan masih kurang dalam menentukan jumlah sumber daya manusia
3. Pengkomunikasian informasi ke seluruh bagian organisasi	a.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir mengkomunikasikan	sebanyak 5 orang atau 50% menyatakan sudah mampu mengkomunikasikan	sebanyak 5 orang atau 50% menyatakan masih kurang dalam mengkomunikasikan

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir Otan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir
di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
IYAN APRIYANTO

	seluruh arah pekerjaan dengan semua koordinator dan petugas pemungut		seluruh arah pekerjaan
	b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait retribusi parkir	sebanyak 5 orang atau 50% menyatakan sudah dapat melakukan sosialisasi	sebanyak 5 orang atau 50% menyatakan masih kurang dalam melakukan sosialisasi
	c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir memberikan penjelasan secara terintegrasi terkait retribusi pada masyarakat	sebanyak 6 orang atau 60% menyatakan sudah dapat memberikan penjelasan secara terintegrasi	sebanyak 4 orang atau 40% menyatakan masih kurang dapat memberikan penjelasan secara terintegrasi
4. Evaluasi terhadap informasi	a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara rutin melakukan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung	sebanyak 5 orang atau 50% menyatakan sudah melaksanakan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung	sebanyak 5 orang atau 50% menyatakan masih kurang melaksanakan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung
	b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) membandingkan hasil kerja dengan rencana sebelumnya	sebanyak 7 orang atau 70% menyatakan sudah dapat membandingkan hasil kerja	sebanyak 3 orang atau 30% menyatakan masih kurang
	c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan bila terjadi penyimpangan	sebanyak 5 orang atau 50% menyatakan sudah mampu mengarahkan atau merekomendasikan	sebanyak 5 orang atau 50% menyatakan masih kurang
5. Pembuatan keputusan	a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir menetapkan saat awal dan akhir pelaksanaan pemungutan retribusi setiap harinya	sebanyak 7 orang atau 70% menyatakan sudah dapat menetapkan saat awal dan akhir pelaksanaan pemungutan retribusi	sebanyak 3 orang atau 30% menyatakan masih kurang dapat menetapkan saat awal dan akhir pelaksanaan pemungutan retribusi
	b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir melakukan kegiatan dan pengumpulan data	sebanyak 6 orang atau 60% menyatakan sudah mampu mengumpulkan data	sebanyak 4 orang atau 40% menyatakan masih kurang dalam mengumpulkan data
	c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir	sebanyak 8 orang atau 80% menyatakan sudah dapat memberikan	sebanyak 2 orang atau 20% menyatakan masih kurang dalam

MODERAT

Modern dan Demokratis

	memberikan prosedur dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang jelas	ptrosedur dan tata kerja	memberikan prosedur dan tata kerja
6. Mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk mengubah perilaku	a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir memberikan motivasi para koordinator wilayah dan petugas pemungut untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing	sebanyak 4 orang atau 40% menyatakan sudah dapat memberikan motivasi	sebanyak 6 orang atau 60% menyatakan masih kurang dapat memberikan motivasi
	b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir melakukan pembinaan bagi para koordinator dan petugas pemungut dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas kerja	sebanyak 7 orang atau 70% menyatakan sudah melakukan pembinaan	sebanyak 3 orang atau 30% menyatakan masih kurang dalam melakukan pembinaan
Rata-rata Persentase		60%	40%

Berdasarkan hasil analisis wawancara bahwa optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil jawaban informan yang menyatakan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebesar 60% sudah baik dan yang menyatakan masih kurang sebanyak 40%.

Selanjutnya hasil observasi menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakan sesuai indikator-indikator aktivitas pengendalian menurut Mahmudi (2013 : 59) seperti perencanaan aktivitas yang akan dilakukan organisasi, pengkoordinasian aktivitas berbagai bagian organisasi, pengkomunikasian informasi ke seluruh bagian organisasi, evaluasi terhadap informasi, pembuatan keputusan dan mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk mengubah perilaku.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Penerimaan retribusi parkir ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah. Hanya saja pemungutan retribusi parkir seringkali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pemungutan retribusi parkir sampai pada

metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Dalam pungutan retribusi parkir pemerintah Kabupaten Pangandaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran tidak lepas dari masalah yang merupakan penghambat dalam pemungutan Retribusi tersebut.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di terminal Pangandaran belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi terminal di Kabupaten Pangandaran

belum memenuhi target seperti yang diharapkan.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya :

1. Masih belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam menentukan jumlah sumber daya manusia dan materil yang dibutuhkan di setiap wilayah obyek retribusi
2. Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam memberikan motivasi pada semua koordinator dan petugas pemungut.
3. Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait retribusi parkir.
4. Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam kegiatan pemantauan langsung dan tidak langsung yang disebabkan
5. Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan bila terjadi penyimpangan.
6. Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam menentukan prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi parkir

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan retribusi parkir dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan retribusi parkir, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir, maka tercapainya target penerimaan retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran itu

dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapat terwujud.

Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi parkir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran selalu berupaya meningkatkan pelaksanaan pengelolaan yang optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi. Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Pangandaran khususnya UPTD Parkir memungut dan mengelola retribusi parkir di terminal dalam upaya meningkatkan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan analisis hasil wawancara mengenai upaya yang dilakukan terhadap indikator-indikator yang mengalami hambatan dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan upaya oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir berupa penambahan jumlah petugas di setiap wilayah parkir sesuai dengan yang dibutuhkan di setiap wilayah obyek retribusi, menambah fasilitas pendukung dilapangan dan penambahan anggaran untuk operasional petugas di lapangan, sehingga UPTD dalam menentukan jumlah sumber daya manusia dan materil yang dibutuhkan di setiap wilayah obyek retribusi dapat optimal
2. Telah dilakukan upaya oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dengan pemberian materil berupa tunjangan dan non materil seperti pujian, sanjungan penghargaan sehingga petugas dapat segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
3. Dilakukan upaya dalam melakukan pengarahan pada para petugas terkait retribusi parkir seperti penyampaian informasi yang jelas dan menyeluruh, pelaksanaan sosialisasi secara rutin dan upaya menambah dan melengkapi fasilitas penunjang sosialisasi dan menambah sejumlah anggaran yang memadai.
4. Telah dilakukan upaya dalam melakukan peninjauan langsung ke lapangan, yang dilakukan secara rutin dengan menambah

MODERAT

Modern dan Demokratis

penyediaan waktu, upaya meminta data laporan hasil kegiatan secara berkala serta upaya meningkatkan sikap pegawai dan komitmen.

5. Telah dilakukan upaya memberikan petunjuk dan bimbingan pada petugas untuk dapat memperjelas materi tentang retribusi parkir, melakukan penilaian kesesuaian antara laporan dengan kenyataan dilapangan serta memberikan sanksi berupa teguran dan peringatan pada petugas bila kurang mematuhi prosedur yang telah ditetapkan
6. Sudah dilakukan upaya dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas kerja berupa penjadwalan tugas yang optimal dan meningkatkan komitmen pegawai dalam melakukan tugasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan sudah baik sebesar 60% dan yang menyatakan masih kurang baik sebesar 40%. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakan sesuai indikator-indikator aktivitas pengendalian seperti perencanaan aktivitas yang akan dilakukan organisasi, pengkoordinasian aktivitas berbagai bagian organisasi, pengkomunikasian informasi ke seluruh bagian organisasi, evaluasi terhadap informasi, pembuatan keputusan dan mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk mengubah perilaku.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di

Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran bahwa terdapat hambatan antara lain yaitu :

- a) Masih belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam menentukan jumlah sumber daya manusia dan materil yang dibutuhkan di setiap wilayah obyek retribusi, b) Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam memberikan motivasi pada semua koordinator dan petugas pemungut. c) Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait retribusi parkir. d) Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam kegiatan pemantauan langsung dan tidak langsung, e) Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan bila terjadi penyimpangan. f) Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dalam menentukan prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.
3. Untuk mengatasi berbagai hambatan optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yaitu berupaya: a) Dilakukan upaya oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir berupa penambahan jumlah petugas di setiap wilayah parkir sesuai dengan yang dibutuhkan di setiap wilayah obyek retribusi, menambah fasilitas pendukung dilapangan dan penambahan anggaran untuk operasional petugas di lapangan, sehingga UPTD dalam menentukan jumlah sumber daya manusia dan materil yang dibutuhkan di setiap wilayah obyek retribusi dapat optimal, b) Telah dilakukan upaya oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir dengan pemberian materil berupa tunjangan dan non materil seperti pujian, sanjungan penghargaan sehingga petugas dapat segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. c) Dilakukan upaya dalam melakukan pengarahan pada para petugas terkait retribusi parkir seperti penyampaian informasi yang jelas dan menyeluruh, pelaksanaan sosialisasi secara rutin dan

upaya menambah dan melengkapi fasilitas penunjang sosialisasi dan menambah sejumlah anggaran yang memadai. d) Telah dilakukan upaya dalam melakukan peninjauan langsung ke lapangan, yang dilakukan secara rutin dengan menambah penyediaan waktu, upaya meminta data laporan hasil kegiatan secara berkala serta upaya meningkatkan sikap pegawai dan komitmen. f) Telah dilakukan upaya memberikan petunjuk dan bimbingan pada petugas untuk dapat memperjelas materi tentang retribusi parkir, melakukan penilaian kesesuaian antara laporan dengan kenyataan dilapangan serta memberikan sanksi berupa teguran dan peringatan pada petugas bila kurang mematuhi prosedur yang telah ditetapkan g) Sudah dilakukan upaya dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas kerja berupa penjadwalan tugas yang optimal dan meningkatkan komitmen pegawai dalam melakukan tugasnya

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sebaiknya dalam optimalisasi pemungutan retribusi parkir harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yang di dilakukan dengan melaksanakan aktivitas pengendalian seperti perencanaan aktivitas yang akan dilakukan organisasi, pengkoordinasian aktivitas berbagai bagian organisasi, pengkomunikasian informasi ke seluruh bagian organisasi, evaluasi terhadap informasi, pembuatan keputusan dan mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk mengubah perilaku.
2. Terkait indikator-indikator yang pelaksanaannya belum optimal sebaiknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran lebih memfokuskan hal penambahan jumlah petugas di setiap wilayah parkir, pemberian motivasi berupa pemberian materiil berupa tunjangan dan non materiil seperti pujian, sanjungan penghargaan, pengarahan pada para petugas terkait retribusi parkir, melakukan peninjauan langsung ke

lapangan, yang dilakukan secara rutin, memberikan petunjuk dan bimbingan pada petugas dan penjadwalan tugas yang optimal dan meningkatkan komitmen pegawai dalam melakukan tugasnya. Dengan demikian hambatan-hambatan yang dihadapi dapat diminimalisir.

3. Sebaiknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran lebih berupaya dalam meningkatkan pelaksanaannya dalam mengatasi berbagai hambatan melalui upaya penambahan jumlah petugas di setiap wilayah parkir, pemberian motivasi berupa pemberian materiil berupa tunjangan dan non materiil seperti pujian, sanjungan penghargaan, pengarahan pada para petugas terkait retribusi parkir, melakukan peninjauan langsung ke lapangan, yang dilakukan secara rutin, memberikan petunjuk dan bimbingan pada petugas dan penjadwalan tugas yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Bambang, Kesit, 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1987. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIE YKPN. Yogyakarta
- Munawir. 1990. *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Siahaan. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo. Persada, Jakarta
- Winardi. 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Kencana

Dokumen Perundangan

- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13
Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14
tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1998.
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Fasilitas Parkir